

KOORDINASI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN HIV/AIDS DI KOTA SORONG

Ismed Kelibay¹, Muhammad Arifin Abdul Kadir², Siti Nurul Nikmatul Ula^{3*}, La Basri⁴, Rosnani⁵

¹Program Program Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

^{2,5}Program Studi Administrasi Negara. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

^{3,4} Program Studi Sosiologi. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: sn396396@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how far the Coordination of the Aids Commission is in efforts to prevent HIV/AIDS transmission in Sorong City, Southwest Papua Province. Coordination plays a very important role in achieving the goals that have been set without coordination, it can be ascertained that a program that has been planned cannot run optimally. The method used is qualitative research. Qualitative research was used to obtain in-depth data on the Coordination of the Aids Commission in Efforts to Prevent HIV/AIDS Transmission in Sorong City. The results of the research conducted show that the group of related agencies that should be giving messages to the community is not working well so that the number of HIV and AIDS sufferers from the general community continues to increase. Apart from that, the quality of human resources at the KPA in Sorong City is inadequate, there is a lack of coordination meetings and the inability of the local government to implement programs related to AIDS prevention in Sorong City. So it can be concluded that the implementation of coordination carried out by the Sorong City KPA with agencies, as well as related institutions has not been optimally carried out properly. Therefore, it is expected that the leadership of the KPA, namely the Mayor of Sorong City, should involve more agencies and other related institutions in order to disseminate information to the public and actively participate in monitoring the coordination of all members of the Sorong City KPA, so that HIV and AIDS prevention in The city of Sorong will improve even better.

Keywords: Coordination; KPA; HIV/AIDS

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana koordinasi komisi penanggulangan AIDS dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Koordinasi memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya koordinasi maka dapat dipastikan suatu program yang telah direncanakan tidak dapat berjalan secara optimal. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga mendapatkan data yang mendalam. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, kelompok instansi terkait yang seharusnya menjadi pemberi pesan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik sehingga angka penderita HIV dan AIDS dari kelompok masyarakat umum terus bertambah. Selain itu, Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada KPA Kota Sorong yang belum memadai, kurangnya rapat koordinasi serta ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program terkait penanggulangan AIDS di Kota Sorong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh KPA Kota Sorong bersama instansi, maupun lembaga-lembaga terkait belum optimal terlaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, diharapkan agar pimpinan KPA yakni Wali Kota Sorong harus

lebih banyak melibatkan instansi dan lembaga-lembaga terkait lainnya guna penyebaran informasi kepada masyarakat serta turut aktif dalam memonitor jalannya koordinasi kepada seluruh anggota KPA Kota Sorong, dengan begitu maka penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Sorong akan meningkat lebih baik lagi.

Kata Kunci: Koordinasi; KPA; HIV/AIDS

PENDAHULUAN

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan masalah kesehatan yang sudah menjadi masalah global. Berdasarkan data *United Nations Programme on HIV and AIDS* (UNAIDS) yang dirilis pada tahun 2018, terdapat 36,9 juta masyarakat di berbagai negara hidup bersama HIV dan AIDS di tahun 2017. Dari total penderita yang ada 1,8 juta diantaranya adalah anak-anak berusia dibawah 15 Tahun dan sisanya 35,1 juta penderita adalah orang dewasa (Azanella, 2018). Selain itu, data yang laporkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus HIV dan AIDS di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan total kasus sebanyak 50.282 kasus, (Pusdatin Kemenkes 2020). Sedangkan untuk jumlah kasus AIDS yang dilaporkan per Provinsi di Indonesia pada tahun 2019 menempatkan Papua berada pada urutan pertama dengan Provinsi paling banyak melaporkan kasus sepanjang tahun 2019 dengan total 653.82 laporan, kemudian disusul Bali dengan jumlah

laporan kasus sebanyak 177.65 laporan dan Provinsi Papua Barat dengan jumlah laporan kasus sebanyak 176.32 laporan.

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas, Papua Barat memiliki tingkat kasus AIDS *Case Rate* tertinggi ke tiga se-Indonesia yakni dengan *case rate* mencapai 176,32 laporan di tahun 2019, hal tersebut melampaui *case rate* Nasional yang hanya mencapai 38,93. Hal ini juga menunjukkan bahwa program penanggulangan AIDS yang sudah berjalan di Papua Barat belum menunjukkan keberhasilan atau dalam kata lain belum menunjukkan penurunan angka penderita HIV dan AIDS. Dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua Barat, Kota Sorong merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah pengidap penyakit HIV dan AIDS tertinggi, berdasarkan data terbaru yang bersumber dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sorong menunjukkan, data di tahun 2019 dengan jumlah kasus baru HIV dan AIDS yang di temukan adalah sebanyak 127 orang, dengan jumlah 48 orang terkena HIV adalah laki-laki dan 58 orang perempuan terkena HIV

sepanjang tahun 2019. Untuk penyakit AIDS terdapat 14 orang adalah berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang berjenis kelamin perempuan.

Dengan adanya data tersebut menunjukkan, bahwa penyakit HIV dan AIDS merupakan pandemi yang jumlahnya selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Untuk itu, selalu dilakukan koordinasi, namun pada pelaksanaannya kadang tidak semuda yang diharapkan. Selain itu menurut (Susanti, 2007) yang menyatakan, jika penanggulangan HIV dan AIDS tidak di koordinasi dengan baik bersama lembaga yang berkepentingan, maka dipastikan program yang telah direncanakan tidak dapat berjalan secara optimal.

Koordinasi memiliki tantangan yang cukup sulit apalagi koordinasi antara lembaga atau instansi yang memiliki level setingkat atau yang setara, sehingga kadangkala penyampaian informasi yang diberikan dianggap tidak berpengaruh, apalagi jika tidak adanya peraturan yang mengharuskan instansi tunduk dan patuh terhadap kesepakatan yang sudah dibuat. Menurut Terry dalam (Sukarna, 2011: 3), “koordinasi adalah sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan arahan yang tepat. Sehingga dapat diketahui,

bahwa koordinasi adalah proses pengaturan untuk memadukan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Banyak sekali instansi yang memiliki kegiatan sejenis, namun tidak terkoordinasikan dengan baik. Kondisi tersebut diperparah apabila koordinasi yang dilakukan bukan semenjak perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Tanpa adanya koordinasi maka arah pencapaian instansi tersebut juga akan berbeda, karena setiap instansi memiliki tujuannya sendiri yang dapat disesuaikan dengan kepentingannya.

Berdasarkan analisis situasi di Indonesia terdapat beberapa kondisi potensial yang dapat memicu penyebaran HIV/AIDS, yaitu: (1) Distribusi penyakit HIV/AIDS pada tahun 2019 sebanyak 68.60% laki-laki dan 31,40% perempuan. Meskipun jumlah penderita AIDS terbanyak adalah laki-laki, akan tetapi dampaknya terhadap perempuan lebih besar, baik dalam masalah kesehatan maupun bidang ekonomi. (2) Proporsi kasus penularan AIDS terbanyak dilaporkan pada usia produktif mulai dari kelompok umur 20-29 tahun (15,1%), kelompok umur 25-49 tahun (70,4%) dan kelompok umur >50 tahun (8,3%). Kelompok usia produktif merupakan hal yang perlu diperhatikan, mengingat

kelompok penduduk ini merupakan aset pembangunan bangsa. (3) Kasus HIV/AIDS juga dijumpai pada bayi dan anak kurang dari 15 tahun, disebabkan tertular dari ibunya saat kehamilan, persalinan maupun ASI dan transfusi darah atau penularan seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi orang tuanya yang meninggal akibat AIDS membutuhkan perhatian khusus dari keluarga dan masyarakat termasuk pemerintah pusat maupun daerah. (4) Penularan HIV/AIDS melalui kontak seks, dilaporkan 70% penularan terjadi melalui hubungan heteroseksual, homoseks 22%, dan sisanya adalah penularan secara perintal 2%, bisex 2%, transfusi 2%, lain-lain 0% dan tidak diketahui 0%.

Koordinasi antara penyelenggara telah menjadi hal yang sangat penting demi tercapainya tujuan bersama. Hal ini sebagaimana dikemukakan (Handoko, 2015:16) yang menuliskan, “Koordinasi (*coordination*) merupakan suatu proses pengintegrasian terhadap tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) demi tercapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi adalah hal yang perlu dilakukan namun pelaksanaannya kadang tidak semudah yang diharapkan.

Hal ini juga dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan (Susanti, 2007), bahwa terkait penanggulangan HIV dan AIDS menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi di dalam KPA itu sendiri, lembaga yang berkepentingan masih bergerak sendiri-sendiri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan, bahwa antar instansi yang terkait tidak terjadi koordinasi yang baik antara satu dengan yang lainnya, sehingga hal tersebut menjadikan program penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Papua Barat hingga kini belum terlaksana secara efektif dan maksimal.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode kualitatif (Sugiyono, 2016), metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak serta membuat suatu kesimpulan atas fenomena yang diteliti tentang Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Dalam Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS Di Kota Sorong. Penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik dalam pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan jumlah informan

sebanyak 8 orang. Data kemudian dianalisis menggunakan tiga alur dalam kegiatan analisis atau proses yang terjadi secara bersamaan Miles dan Huberman dalam (Purnama, 2021), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen analisis tersebut bersifat interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang koordinasi pelaksanaan program penanggulangan AIDS di Kota Sorong, bahwa koordinasi yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sorong dengan lembaga-lembaga terkait seperti: Dinas Kesehatan, LSM, Puskesmas, dan Pokja saat ini telah dilakukan dengan baik. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibu JI, selaku sekretaris KPA Kota Sorong, mengemukakan bahwa:

“Selama ini kesatuan tindakan yang telah terjalin antara KPAK dengan Dinas Kesehatan, LSM, dan Pokja itu sudah sangat baik ya. Karena LSM yang bergerak di HIV itu dibawah pembinaan KPAK secara langsung dan juga KPAK bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga pelayanan kesehatan yang ada, nah itu untuk mendukung dalam penanggulangan HIV/AIDS itu sendiri, termasuk pembinaan dalam hal misalnya hotspot-hotspot populasi kunci seperti: panti pijat, minibar dan

lokalisasi” (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak TJI, selaku Ketua LSM Yayasan Sorong Sehati:

“Kita sering melakukan koordinasi, baik melalui WA grup maupun langsung. Ketika ada kegiatan dari KPA Kota Sorong melibatkan kami dari teman-teman LSM Sorong Sehati khususnya bergerak di bidang kelompok pendukung sebaya (KDS), kita mengadakan pelatihan khusus penguatan pengetahuan tentang HIV kepada teman-teman KDS” (Wawancara pada tanggal 10 Januari, 2023).

Kemudian, pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak HK, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong:

“Berbicara masalah penanggulangan AIDS, tentu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang saja. Dinas Kesehatan lintas sektor kita libatkan jadi sampai ke Keamanan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Perempuan serta LSM termasuk KPA Kota Sorong, semua kita libatkan dalam hal penanggulangan AIDS. Dinas Kesehatan juga selalu melakukan mengkoordinir yang baik dengan Puskesmas dan Rumah Sakit untuk melaksanakan program-program penanggulangan” (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).

Pelaksanaan penanggulangan AIDS oleh KPA Kota Sorong ditemukan, bahwa komunikasi dalam pelaksanaan program penanggulangan AIDS di Kota Sorong

dengan Dinas Kesehatan maupun antar lembag-lembaga terkait lainnya telah berjalan dengan baik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ibu JI, selaku Sekretaris KPA Kota Sorong, bahwa:

“Komunikasi KPA Kota Sorong dengan lembaga terkait dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ada juga pertemuan koordinasi antara populasi kunci melalui pokja-pokja yang sudah kami bentuk dan mereka bertanggung jawab pada masing-masing populasi mereka. Misalnya populasi WPS (Wanita Pekerja Seks), populasi LSL (Lelaki Sesama Lelaki), mereka ini punya pokjanya masing-masing. Kemudian dalam setiap pertemuan koordinasi, KPA memaparkan situasi HIV yang ada di Kota Sorong terkini serta memaparkan isu-isu strategis yang dapat ditindak lanjuti” (wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).

Selain itu JG, selaku Ketua Pokja Anggrek KPTA Kota Sorong mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang dibangun KPA Kota Sorong bersama Dinas Kesehatan maupun LSM, sudah berjalan baik. Namun, dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala baik antar instansi maupun dengan lembaga-lembaga terkait. Sering kali mereka sibuk karena sedang banyak kegiatan sehingga apa yang menjadi kendala tersebut tidak tersampaikan, tapi itu terakhir tahun 2020 sebelum corona” (Wawancara pada tanggal 13 Januari, 2023).

Koordinasi yang baik maka diperlukan pembagian tugas yang jelas di setiap anggotanya. Namun setiap aktivitas yang dilakukan oleh KPA Kota Sorong terkait pembagian kerja dalam penanggulangan AIDS di Kota Sorong penulis tidak menemukan adanya pembagian tugas secara terstruktur yang dilakukan oleh KPA Kota Sorong, hal ini seperti yang disampaikan Bapak HK, selaku Kepala Dinas Kota Sorong, menyampaikan bahwa:

“Untuk pembagian tugas kita sudah jelas karena kita bekerja sesuai dengan juknis dan petunjuk yang sudah ada, KPA hanya pada kebijakan saja, tetapi teknis pelaksanaannya di puskesmas dan rumah sakit serta didukung oleh teman-teman lembaga mitra seperti, LSM dan lain-lain” (wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak TJI, selaku Ketua LSM Yayasan Sorong Sehati:

“Kalau pembagian kerja sebenarnya dari masing-masing LSM sudah punya management sendiri kita hanya melaporkan program kita kepada KPA Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota, bahkan ke Dinas Kesehatan, sehingga KPA hanya menyesuaikan dengan tupoksi yang sudah ada, khususnya kami dari LSM Sorong Sehati” (wawancara pada tanggal 10 Januari, 2023).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu JI, sebagai Sekretaris KPA Kota Sorong:

“Untuk pembagian tugas itu memang tidak ada, hanya sebenarnya tugas itu sudah melekat pada masing-masing instansi, hanya tetap saja mereka sebagai mediator ataupun mediasi disitu tetap melibatkan KPA, misalnya Dinas Kesehatan mereka setiap kali ada kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi, mereka tidak langsung begitu saja, namun selalu melibatkan KPA, sehingga dinas kesehatan dan KPA mengetahui kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut” (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).

Kemudian, pendapat tersebut diperkuat oleh Ibu NB, sebagai penanggung jawab CVT di Puskesmas Klasaman kilo 12 Kota Sorong, bahwa:

“Kalau perincian dan pembagian tugas itu dari Dinas Kesehatan tidak ada, mengenai TUPOKSI itu dari kita Puskesmas sendiri yang buat”. (wawancara pada tanggal 18 Januari, 2023).

Koordinasi terkait dengan tenaga kerja yang terlibat didalamnya juga diketahui belum maksimal demi untuk menunjang pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Sorong. Hal tersebut sebagaimana

disampaikan oleh Ibu JI, sebagai Sekretaris KPA Kota Sorong:

“Untuk KPA itu ada 3 orang yang bekerja, saya sendiri sebagai PLT sekretaris, kemudian ada Bendahara dan Pengelola Logistik, sementara yang bagian Pengelola Program saat ini masih kosong dari karena kekurangan dana sehingga kami belum bisa merekrut petugas baru. Namun demikian, jika mengenai tanggungjawab tetap kami jalankan” (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).

Hal yang sama sebagaimana ditambahkan Bapak I, selaku Ketua LSM Yayasan Papua Lestari, bahwa:

“Kami memahami permasalahan yang ada di KPA Kota saat ini dan kami saling mengerti, jadi misalnya kalau kami meminta KPA Kota untuk fokus melakukan pembinaan dan fokus melakukan koordinasi, tapi jumlah staf KPA Kota saat ini hanya 2 orang, sekretaris KPA ibu Jenny dia juga ber Dinas, maka untuk menjalankan fungsi KPA Kota juga agak kesulitan”. (Wawancara pada tanggal 19 Januari, 2023).

Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan AIDS yaitu adanya sekretariat KPA Kota Sorong yang menjadi Sarana dan Prasarana sekaligus sebagai kantor untuk dilakukan koordinasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan stakeholders dalam upaya pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak HK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong:

“Terkait sarana dan prasarana saat ini sudah lengkap, semua layanan sudah kita siapkan untuk pasien-pasien yang dalam tanda kutip HIV ataupun yang dicurigai. Layanan kita dikatakan siap karena memang disana kita punya tenaga untuk pemeriksaan HIV” (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).

Kemudian, pendapat lain sebagaimana disampaikan Ibu NB, selaku penanggung jawab CVT di Puskesmas Klasaman kilo 12 Kota Sorong:

“Kalau sarana dan prasarana menurut saya saat ini sudah menunjang, akan tetapi kekurangannya untuk tes reagen. Untuk tes reagen sifilis untuk saat ini belum ada, kalau ARV kita sudah tidak ada masalah, untuk stoknya kita ambil di dinas melalui rumah sakit penampung Sele Be Solu” (Wawancara pada tanggal 18 Januari, 2023).

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Sorong terdapat banyak lembaga-lembaga terkait mengalami kendala masalah dana, apalagi dengan berakhirnya sumbangan yang berasal dari lembaga donatur internasional. Hal ini disampaikan Ibu JI, Sekretaris KPA:

“Memang untuk KPA anggarannya berasal dari APBD, kalau dulu ada juga dari KPA Pusat tetapi karena KPA pusat telah dibubarkan sehingga kita hanya mengharapkan dana dari APBD tetapi selama ini kebutuhan anggaran yang kami minta tidak pernah sesuai dengan yang kami terima, sehingga hal ini mengakibatkan koordinasi untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi masih kurang dilakukan” (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).

Kemudian, pada penelitian yang penulis lakukan terkait dengan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS, penulis menemukan, bahwa yang menjadi hambatan lainnya adalah kondisi sosial budaya masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibu JI, selaku Sekretaris KPA Kota Sorong, bahwa:

“Kendala lain yang dihadapi dalam penanggulangan HIV/AIDS ini adalah pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah tentang penyakit HIV dan AIDS, sehingga stigma dan diskriminasi itu masih sangat tinggi, apalagi kalau kita di Papua ini masih sangat terikat dengan adat dan istiadat sehingga apabila sepasang suami istri ketahui salah satunya yang terkena HIV maka sistem denda akan berlaku, sehingga orang terkena tersebut cenderung lebih menutup diri tentang statusnya, baik terhadap pasangannya maupun orang lain” (Wawancara pada tanggal 09 Januari, 2023).

Pendapat tersebut di perkuat oleh keterangan Bapak I, Selaku Ketua Yayasan Papua Lestari, bahwa:

“Masalah diskriminasi masih sangat tinggi tetapi semenjak adanya corona di tahun 2019, hal tersebut berbanding lurus dengan masalah covid kemarin. Akan tetapi kadang hal ini menjadi bumerang juga bagi teman-teman ODHA karena pada saat diketahui dia ini terkena HIV atau AIDS, dia langsung dijauhi dan dikucilkan masyarakat, tindakan seperti ini masih tetap berlanjut dan masih tinggi, oleh sebab itu dibutuhkan peran banyak pihak dalam menangani masalah tersebut” (Wawancara pada tanggal 19 Januari, 2023).

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui, salah satu kendala mengapa tingkat HIV dan AIDS di Kota Sorong sangat tinggi karena disebabkan tingginya diskriminasi terhadap ODHA. Kemudian, masih kentalnya budaya denda kepada pasangan suami istri yang terbukti terkena penyakit HIV/AIDS tersebut, sehingga hal ini menjadikan orang-orang yang terkena HIV cenderung lebih menutup diri. Akibatnya orang yang mengidap HIV itu perlahan-lahan tubuhnya menjadi semakin sakit dan masuk pada stadium AIDS yang mana hal itu akan cenderung lebih sulit dalam penanganannya.

Koordinasi dalam pelaksanaan program penanggulangan AIDS oleh KPA Kota Sorong harusnya menjadi perhatian serius pemerintah Kota Sorong. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat merespon setiap masalah yang menjadi kendala KPA dalam melaksanakan program penanggulangan HIV dan AIDS. Dengan demikian, Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan AIDS oleh KPA Kota Sorong dipastikan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini indikator yakni: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, dan Disiplin belum menunjukkan adanya satupun pelaksanaan koordinasi yang sesuai diharapkan. Kelompok instansi terkait yang seharusnya menjadi pemberi pesan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik, sehingga angka penderita HIV dan AIDS dari kelompok masyarakat umum terus bertambah. Selain itu, pihak penyelenggara program penanggulangan AIDS di Kota Sorong belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan KPA Kota Sorong bersama instansi, maupun

lembaga-lembaga terkait belum optimal terlaksanaan.

Kemudian, kualitas sumber daya manusia (SDM) pada KPA Kota Sorong belum memadai, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program-program, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program terkait penanggulangan AIDS di Kota Sorong serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Maka, diharapkan agar pimpinan KPA Kota Sorong yakni Wali Kota Sorong harus lebih banyak melibatkan instansi dan lembaga-lembaga terkait guna unjtuk penyebaran informasi kepada masyarakat serta turut selalu aktif dalam memonitor jalanya koordinasi kepada seluruh anggota KPA Kota Sorong, dengan begitu maka penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Sorong akan meningkat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian, Konsep, Teori dan Fakta dalam upaya menciptakan good governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada: Jakarta.
- Dann, Sugandha. 1988. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Intermedia: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, Prodjowijono. 2012. *Management Gereja: Sebuah Laternatif*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Winardi. 2015. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Edisi Revisi, Prenadan Media Grup Jakarta.
- Zulkarnain, Wildan dan Raden Bambang Sumarsono. 2018. *Manajemen dan Etika Perkantoran*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Andriani Aida dan Wizatnuz Izzati, *Analisa Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi*, Jurnal Endurance 3 (3) Oktober 2018, hal. 544.
- Gede Susanti, Niluh. Dkk. *Koordinasi Stakeholder Dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari*, Working Paper Series No.3 Oktober 2007. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2007.
- Hermayanty Irma dan Dhesti Widya Nurhasanah Ningrum, *Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Sumedang*, Jurnal Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 7 (1): 12-13, 2019, hal. 17.
- Putro, Untoro Wibowo. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada*

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tesis, Universitas Nasional.

Ramdhani, Abdulah dan Muhamad Alli Ramdhani. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, Vol. 11 No 01, 2017.

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional.

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Penyakit AIDS di Kota Sorong.

Azanela, Luthfia Ayu. 2018. *HIV/AIDS dalam Angka 36,9 juta Penderita*. <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/12/01/124545720/hivaid-dalam-angka-369-juta-penderita-25-persen-tak-menyardarnya/> (diakses pada tanggal 15 Januari 2023).

Indonesia, *Laporan perkembangan HIV-AIDS dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*, 2018, diakses melalui: http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_4_Tahun_2017_1.pdf, diakses pada 18 Januari 2023, pukul 21.00 WIT.

Ismed Kelibat lahir di Desa Dai pada tanggal 04 April 1992. Pada tahun 2017 lulus S1 di Universitas Muhamamdiyah Sorong dan S2 di Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta lulus pada tahun 2019, saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap FISIP Universitas Muhamamdiyah Sorong dari tahun 2020 hingga sekarang.

PROFIL SINGKAT